



WHITEPAPER – RINGKASAN EKSEKUTIF

8 Rekomendasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8%

*Delapan rekomendasi dari perusahaan anggota USABC kepada Pemerintah Indonesia dalam 2026
USABC Indonesia Business Mission, untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah Indonesia.*

Oktober 2026



Akses Dokumen:

qrco.de/wp848idbm26

8%

MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN BISNIS

Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan.

TARGET PEMERINTAH

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Target ini ambisius, tetapi Indonesia pernah tumbuh 9,9% pada 1980 berkat booming minyak dan rata-rata 6,8% pada 1986–96, terutama didorong investasi dan ekspor. Rata-rata 8% membutuhkan komitmen jangka panjang. Pengalaman USABC di ASEAN, seperti di Vietnam, menunjukkan bahwa target pertumbuhan yang konsisten didukung oleh pimpinan tertinggi, diterjemahkan ke dalam kebijakan, dan menjadi acuan bersama kementerian serta pemerintah provinsi.

SEKILAS TARGET PEMERINTAH DALAM ANGKA

8%

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia

6,8%

Rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1980 dan 1990, sebagai dampak industrialisasi

~Rp1.000 T

Pencapaian investasi pada semester-I 2026, sekitar separuh target tahunan

83%

bahan baku produksi perusahaan asing di Indonesia berasal dari produsen Indonesia

INVESTASI ADALAH KOMPONEN PALING BERPELUANG MENDORONG PERTUMBUHAN

C

Konsumsi rumah tangga

Komponen terbesar. Tumbuh 5,06% pada kuartal II 2026, tetapi bergantung pada pendapatan dan lapangan kerja yang turut diciptakan investasi.

+

I

Investasi

Komponen dengan ruang terbesar untuk mendorong pertumbuhan menuju 8%.

+

G

Belanja pemerintah

Dibatasi oleh ketersediaan anggaran, sehingga kontribusinya terbatas.

+

X-M

Ekspor impor

Bergantung pada permintaan dalam dan luar negeri.

INVESTOR ASAL LUAR NEGERI YANG TELAH BEROPERASI DI INDONESIA ADALAH SUMBER INVESTASI YANG PALING DAPAT DIANDALKAN

1

Membayar pajak dan PNPB kepada negara.

2

Menyediakan barang dan jasa yang mendukung agenda Pemerintah.

3

Memperkuat ekosistem sebagai pelanggan pemasok lokal, pemberi kerja, pelatih, dan pembawa inovasi.

Ketika perusahaan-perusahaan dapat beroperasi dalam ekosistem usaha yang memberikan kepastian hukum dan kebijakan, mereka dapat meningkatkan kegiatan investasi dan usahanya. Banyak asosiasi bisnis dan OECD menyatakan bahwa kepastian regulasi dan konsistensi pelaksanaan menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan investasi.

TIGA KONDISI YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN REINVESTASI PERUSAHAAN

Kejelasan dan konsistensi

REKOMENDASI 1, 4, 8

Perusahaan dapat patuh jika persyaratan, otoritas, dan tenggat waktu jelas serta diterapkan konsisten. Prosedur yang tidak jelas, kewajiban yang tumpang tindih, dan masa transisi yang tidak pasti dikaitkan anggota dengan tertundanya keputusan.

Kapabilitas dan proporsionalitas

REKOMENDASI 2, 3, 6

Regulasi paling efektif bila menjawab risiko yang teridentifikasi dan sesuai dengan SDM, sistem, dan kapasitas domestik. Anggota kami menyampaikan aturan yang tidak disertai kesiapan pengujian, SDM, atau sistem membuat produk terlambat masuk ke pasar dan sebagian investor menunda peluncuran.

Kemitraan

REKOMENDASI 5, 7

Perizinan adalah awal siklus investasi. Investor membutuhkan mitra di pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah lintas instansi dan mendengar persoalan sejak dini. Anggota menyebut investor sering kesulitan menemukan mitra yang tepat.

REKOMENDASI KE- 1



Memodernisasi Proses Impor untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Indonesia

HASIL YANG DIHARAPKAN

Akses yang dapat diprediksi terhadap bahan baku penting, suku cadang, peralatan, dan teknologi dapat membantu dunia usaha mengurangi keterlambatan dan biaya yang dapat dihindari. Kondisi ini menjaga aktivitas operasional dan komersial para pelaku usaha sehingga dapat memperluas usahanya, dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan industri dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Hambatan yang dihadapi



Persetujuan terfragmentasi: Pertimbangan teknis (Pertek), persetujuan impor, neraca komoditas, persyaratan sektoral dikelola oleh instansi yang berbeda sehingga rawan tumpang tindih satu sama lain.



Keseimbangan antara pengembangan industri dalam negeri dan daya saing: Pembatasan impor e-commerce dapat mempersempit pilihan konsumen.



Risiko dan pasokan: BPJPH 4/2026 mensyaratkan laporan jaminan halal per pengiriman. Persetujuan impor gula, garam, dan jagung tertunda pada 2026, sementara ketersediaan, atau konsistensi produk industri domestik tidak sesuai kebutuhan produsen.



Klasifikasi tarif: Contohnya bea masuk 10% atas perangkat jaringan HS 8517, padahal tarif terikat dalam Information Technology Agreement (ITA) WTO adalah 0%.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- Tingkat persetujuan kuota rerata di angka **10–50%** dan waktu pemrosesan kuota selama **30–60 hari** untuk impor kendaraan (USABC, 2025).
- Dampak yang ditanggung importir melebihi **USD 1 juta** per tahun.
- Perusahaan pengguna input impor berkinerja lebih baik (Bank Dunia, 2015).

PRAKTIK REGIONAL

Vietnam: UU Kepabeanan hasil revisi (Agu 2026) beralih ke *post-clearance checks*. Pemerintah membentuk basis data nasional bersama yang menggantikan dokumen kertas.

Filipina: Periode keberlakuan akreditasi importir diperpanjang dari 1 menjadi 3 tahun pada 2026, dengan perpanjangan otomatis bagi importir yang memenuhi syarat.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Menggabungkan permohonan pertimbangan teknis dan persetujuan impor dalam satu pengajuan, lalu hubungkan SIINas, INATRADE, dan National Single Window untuk simplifikasi pengajuan pemohon dan memudahkan *tracking*.
- 2 Menetapkan waktu pemrosesan paling lama untuk setiap tahap, disertai pelacakan, alasan tertulis atas keterlambatan atau penolakan, dan jalur eskalasi.
- 3 Mempublikasikan metodologi dan jadwal pembaruan neraca komoditas, izinkan revisi di tengah tahun saat pasokan dalam negeri kurang, dan berikan pemberitahuan sebelum menambah komoditas.
- 4 Menerapkan persyaratan bahan baku, peralatan, dan teknologi secara proporsional terhadap risiko, termasuk inspeksi sebelum pengapalan dilakukan hanya jika diperlukan untuk menangani risiko tertentu khusus Indonesia yang didukung bukti saintifik.
- 5 Memberikan proses pemeriksaan yang lebih sederhana kepada importir dengan rekam jejak kepatuhan yang baik, dengan pemeriksaan berbasis risiko setelah barang tiba.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Barang dan jasa andalan masyarakat, dari pangan hingga obat dan layanan digital, tetap tersedia dengan harga lebih stabil dan pekerjaan terjaga.

BAGI USAHA & PEKERJA

Produsen, peritel, dan usaha kecil dapat merencanakan pesanan dengan yakin dan mempertahankan pekerja. Perusahaan mendapat lead time andal untuk merencanakan stok dan ekspansi.

BAGI PEMERINTAH

Penerimaan kepabeanan, pajak, dan PNPB dapat stabil, dan petugas persetujuan dapat berfokus pada kasus berisiko lebih tinggi. Pabrik hilir dapat menjadwalkan operasinya, mendukung prioritas hilirisasi.

REKOMENDASI KE-2



Meningkat Kepercayaan Regulator Antar-Negara agar Manfaat Industri Lebih Cepat Menjangkau Publik

HASIL YANG DIHARAPKAN

Pemanfaatan hasil uji, sertifikasi, dan persetujuan luar negeri yang kredibel di Indonesia, berdasarkan kriteria yang jelas, akan membantu produk aman lebih cepat sampai ke pelaku usaha dan dapat membantu eksportir Indonesia membangun kredibilitas untuk memperoleh penerimaan serupa di luar negeri.

Hambatan yang dihadapi



Pengakuan hasil pengujian luar negeri: Laporan hasil uji perangkat TIK yang dulu diterima melalui mekanisme pengakuan kini memerlukan pengaturan antarpemerintah.



Pengakuan dan kapasitas: Pada tahun 2025 sejumlah lembaga halal asing membutuhkan lebih dari tiga bulan untuk diakui setara, dan ketersediaan kapasitas laboratorium serta asesor terbatas.



Persyaratan berlapis: SNI, halal, dan pengujian lokal dapat berlaku berurutan pada satu produk. Laporan halal diperlukan per pengiriman, dan panduan barang transit masih belum terbit.



Jaminan bagi konsumen: Jaminan halal penting bagi konsumen, tetapi sertifikasi yang lambat dapat menunda akses pasien terhadap obat.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- Periode satu sertifikasi SNI umumnya memakan waktu **6 bulan** dan total biaya **>USD 20.000** untuk seluruh proses.
- Dalam sektor pangan dan pertanian, OECD menemukan persyaratan penilaian kesesuaian hampir selalu menghambat perdagangan.
- ASEAN memiliki pengaturan bersama untuk peralatan listrik, kosmetik, & inspeksi pabrik obat.

PRAKTIK REGIONAL

Singapura: Produk listrik dan gas rumah tangga berisiko rendah dapat memakai deklarasi kesesuaian pemasok yang didukung laporan uji.

Vietnam: *Law on Product and Goods Quality* (Law No. 78/2025/QH15) yang diperbarui (berlaku 1 Januari 2026) beralih ke klasifikasi berbasis risiko dan memperluas pengawasan setelah produk beredar di pasar.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Menerima secara formal hasil uji, sertifikasi, dan persetujuan luar negeri yang terakreditasi sebagai jalur standar di setiap sektor, dan pulihkan jalur yang telah ditutup.
- 2 Mempublikasikan kriteria kesetaraan produk (bukti yang diperlukan, waktu proses, dan jalur), dimulai dari satu kelompok produk berisiko rendah.
- 3 Menyelenggarakan dialog teknis secara berkala antara regulator, mitra luar negeri, lembaga akreditasi, laboratorium, dan industri.
- 4 Mempublikasikan kriteria dan tenggat masukan pemangku kepentingan di dalam negeri, baik pelaku global dan domestik, serta jalur *debottlenecking* resmi bila suatu tahap terlambat.
- 5 Menerapkan pengaturan persyaratan pengujian lokal hanya jika ada risiko yang teridentifikasi atau perbedaan material pada kondisi Indonesia.
- 6 Memfasilitasi asesor dan laboratorium Indonesia dalam memperoleh pengakuan regional dan internasional.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Masyarakat dapat memiliki lebih banyak pilihan barang terpercaya, dari pangan dan produk konsumen hingga obat dan peralatan, dengan jaminan keselamatan yang sama.

BAGI USAHA & PEKERJA

Laboratorium, lembaga sertifikasi, dan tenaga profesional teknis Indonesia dapat memperoleh peluang kerja serta akses ke pasar regional. Produsen dan eksportir dapat menjangkau pasar lebih cepat tanpa pengujian berulang.

BAGI PEMERINTAH

Pengujian dapat difokuskan pada produk berisiko lebih tinggi, dan perdagangan yang lebih luas dapat menambah penerimaan kepabeanan dan pajak. Tujuan perlindungan konsumen dan jaminan halal tidak berubah.

Membangun Kapabilitas Teknis Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Digital Indonesia

HASIL YANG DIHARAPKAN

Birokrat sektor digital memiliki pemahaman, kemampuan, anggaran, dan prosedur yang mumpuni untuk mengelola teknologi digital dapat memberikan kepastian aturan kepada dunia usaha serta layanan digital secara optimal kepada publik, sehingga mendorong lebih banyak investasi digital dan lapangan kerja terampil.

Hambatan yang dihadapi



Regulasi: Aturan tidak membedakan data yang disimpan dari pemrosesan sesaat, seperti enkripsi dan inferensi AI.



Kelembagaan: Pengaturan AI, data pribadi, dan keamanan siber tersebar di beberapa lembaga, dengan aturan pelaksana yang masih tertunda.



Kapasitas: Instansi butuh lebih banyak spesialis teknis, sedangkan penganggaran, pengadaan, dan audit belum dirancang untuk teknologi yang cepat berubah.



Tujuan kebijakan: Penerapan ketentuan penyimpanan data dalam negeri secara luas tanpa kategorisasi yang jelas dan pragmatis dapat menghambat inovasi dan menunda penggunaan cloud dan AI oleh dunia usaha.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- Kontribusi AI di Indonesia diperkirakan mencapai USD 366 miliar pada 2030.
- Persetujuan awal penempatan data di luar negeri dalam aturan sektor keuangan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan
- Anggota melaporkan keterbatasan keterlibatan secara bermakna atas konsultasi aturan terkait AI, termasuk peta jalan AI, etika, hak cipta, keamanan siber, dan UU Satu Data Indonesia.

PRAKTIK REGIONAL

Malaysia: Kerangka berbasis risiko menggantikan daftar negara yang disetujui untuk transfer data (2025).

Filipina: Menerapkan klasifikasi data berbasis risiko, bukan lokalisasi menyeluruh, pada data pemerintah setelah menerima masukan industri.

Singapura: Proyek teknologi pemerintah dimulai dari prototipe dan hanya naik penerapan bertahap, hanya jika tiap tahap berhasil.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Meningkatkan pemahaman pegawai pemerintah di bidang kebijakan, perizinan, pengadaan, pengawasan, dan audit terkait isu rantai pasok digital dari rantai pasok konvensional.
- 2 Membangun kapabilitas melalui rekrutmen khusus, pelatihan berkelanjutan, dan kerja sama dengan industri serta universitas.
- 3 Membedakan pengaturan *stored data*, data in-transit, dan *momentary processing*. Untuk pemrosesan risiko rendah, cukup pemberitahuan tanpa persetujuan awal.
- 4 Menguji persyaratan digital utama melalui uji coba (pilot) dan sandbox, dan terapkan pendekatan berbasis risiko untuk AI.
- 5 Menyelaraskan mandat, anggaran, pengadaan, dan audit dengan biaya siklus hidup, dan publikasikan persyaratan cloud, AI, dan data di INAPROC sebelum tender dibuka.
- 6 Menetapkan standar interoperabilitas agar sistem internasional dan domestik dapat bekerja bersama dalam pembayaran, cloud, dan transfer data.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Layanan perbankan, digital, dan publik yang lebih aman serta fitur pembayaran baru dapat hadir lebih cepat, dan lebih banyak orang dapat ikut dalam ekonomi digital.

BAGI USAHA & PEKERJA

Perusahaan teknologi dan UMKM dapat tumbuh di pasar lebih besar. Bank, produsen, dan logistik dapat mengadopsi AI, cloud, dan keamanan siber dengan yakin, dan pekerja dapat meningkatkan keterampilan.

BAGI PEMERINTAH

Sektor digital yang lebih aktif dapat menambah penerimaan pajak dan lapangan kerja terampil, dan belanja publik untuk sistem digital lebih berdaya guna. Mendukung agenda transformasi digital RPJMN.

Meningkatkan Kepastian Regulasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

HASIL YANG DIHARAPKAN

Investor yang memahami aturan apa yang akan terbit dan bagaimana penerapannya dapat memperhitungkan risiko dan menanamkan modal, sehingga investasi dan ekspansi melampaui satu siklus kebijakan.

Hambatan yang dihadapi



Regulasi: Aturan pelaksana terlambat atau tidak lengkap, dengan transisi singkat dan tanpa interpretasi yang dipublikasikan.



Kelembagaan: Proses di tingkat nasional dan daerah, termasuk yang melibatkan masyarakat setempat, belum selalu selaras.



Kesinambungan kebijakan: Siklus realisasi investasi lebih panjang daripada siklus politik dan pemilu.



Proses: Anggota menyebut waktu restitusi pajak yang tidak jelas, dan interpretasi pajak atau akuntansi baru menyebabkan dana tertahan.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- Columbia Center on Sustainable Investment melaporkan ketidakpastian regulasi sebagai kekhawatiran utama investor.
- AmCham Indonesia dan U.S. Chamber of Commerce (2026): kompleksitas regulasi, spesifik sektor, dan sering berubah.

PRAKTIK REGIONAL

Vietnam: Resolusi 66.18 (Jul 2026–Feb 2027) memungkinkan pemangkasan dan penyederhanaan prosedur sementara UU direvisi.

Malaysia: National Geo-Economic Command Centre memiliki kelompok kerja industri sebagai saluran formal bagi masukan dunia usaha.

Filipina: Menjadikan Trustmark e-commerce bersifat sukarela dan memperpanjang jangka waktunya setelah konsultasi.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Memublikasikan linimasa/ jadwal ketentuan yang akan berlaku, ditinjau, atau diganti, termasuk aturan AI, data pribadi, dan keamanan siber yang masih tertunda.
- 2 Memeriksa kesiapan pelaksanaan sebelum persyaratan diberlakukan, termasuk dampak ekonominya, kesiapan SDM, anggaran, dan sistem pada lembaga yang bertanggung jawab.
- 3 Memublikasikan rancangan aturan cukup dini agar masukan bermakna, jelaskan tujuannya, dan tunjukkan bagaimana masukan dipertimbangkan.
- 4 Menetapkan dan memberi wewenang otoritas penanggung jawab, menerbitkan panduan pelaksanaan, dan atur masa transisi yang proporsional.
- 5 Menerbitkan dan memublikasikan interpretasi resmi agar penerapan di seluruh kantor dan daerah seragam di seluruh kantor dan daerah, termasuk untuk pajak dan keuangan.
- 6 Menyediakan alasan tertulis atas keputusan material, jalur keberatan dan peninjauan yang mudah diakses, serta terapkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tepat waktu.
- 7 Membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebelum PP 33/2026 berlaku, dan menunjuk otoritas sementara untuk menerbitkan panduan.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Pelaksanaan pekerjaan dan layanan yang bergantung pada proyek jangka panjang dapat berlangsung lebih stabil, serta proses pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha lebih jelas dan adil.

BAGI USAHA & PEKERJA

Perusahaan dan pekerja mendapatkan jaminan regulasi dalam perencanaan pelaksanaan, penambahan, serta pertumbuhan investasi. Biaya dan imbal hasil modal pun lebih mudah diperkirakan.

BAGI PEMERINTAH

Penerimaan negara menjadi lebih stabil karena pelaku usaha dapat merencanakan pemenuhan kewajiban kepatuhan sembari beroperasi. Mendukung prioritas Asta Cita tentang reformasi birokrasi dan target investasi RPJMN.

REKOMENDASI KE-5



Memosisikan Pemerintah sebagai Mitra Investasi Jangka Panjang demi Pertumbuhan Produktif

HASIL YANG DIHARAPKAN

Investor dengan mitra pemerintah yang didedikasikan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah usaha secara lintas sektor dapat menyelesaikan masalah secara cepat, meningkatkan nilai investasi, merekomendasikan Indonesia, dan mempertahankan lebih banyak lapangan kerja.

Hambatan yang dihadapi



Kelembagaan: Investor sulit menemukan mitra pemerintah yang tepat. Penanganan masalah oleh kementerian dan daerah dilakukan secara terpisah.



Tujuan kebijakan: Batas kepemilikan melindungi pelaku domestik, tetapi dapat menekan investasi bila modal lokal terbatas.



Kapasitas: Mandat *aftercare* BKPM belum memfasilitasi penyelesaian masalah/kekhawatiran investor secara lintas sektor.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- **Sekitar separuh** target investasi 2026 terealisasi pada semester pertama.
- Terdapat batasan kepemilikan asing: **49%** di jasa pos, **20%** di pemrosesan dan switching pembayaran.
- **Bank Dunia:** *aftercare* membantu mempertahankan dan memperluas FDI, dipandu satu lembaga utama.

PRAKTIK REGIONAL

Filipina

Helpdesk Board of Investments mencakup perizinan dan *aftercare*.

Thailand

Board of Investment menghimpun staf dari beberapa instansi dalam satu pusat.

Malaysia

Invest Malaysia Facilitation Centre di Johor menaungi 30+ instansi dan Land Taskforce untuk persetujuan lahan dan pembangunan.

Vietnam

Dana Dukungan Investasi (*Decree 182/2024*) memberi dukungan dana bagi investor yang memenuhi syarat.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Memperkuat *aftercare* BKPM sebagai layanan satu pintu bagi investor eksisting, dengan mandat mempertahankan instansi dan satu helpdesk.
- 2 Menetapkan waktu respons, tunjuk otoritas yang bertanggung jawab, dan pantau kemajuan kasus lintas instansi.
- 3 Melibatkan investor *existing* secara rutin dalam diskusi terkait hambatan, ekspansi, dan kebutuhan pemasok lokal.
- 4 Memublikasikan kinerja layanan berupa waktu penyelesaian, kepuasan investor, serta investasi yang dipertahankan atau meningkat.
- 5 Menerapkan kriteria layanan yang objektif dan terkait dengan kegiatan produktif, lapangan kerja, pengadaan lokal, dan keterampilan.
- 6 Menggunakan kejadian berulang/ *preseden/pattern* untuk mengidentifikasi perubahan lebih luas yang membantu perusahaan domestik maupun asing.
- 7 Meninjau batasan kepemilikan bila kemitraan dapat melindungi partisipasi domestik sekaligus menambah modal dan kapabilitas.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Masyarakat dapat mempertahankan pekerjaan dan layanan dari operasi yang ada, dan lebih banyak orang menjangkau layanan keuangan dan logistik baru.

BAGI USAHA & PEKERJA

Pekerja, pemasok, dan distributor dapat mempertahankan kontrak dan tumbuh bersama ekspansi, dan mitra Indonesia dapat memperoleh pekerjaan baru. Perusahaan punya satu tempat untuk masalah lintas instansi.

BAGI PEMERINTAH

Investasi yang ada dapat bertahan dan tumbuh, sehingga pajak, lapangan kerja, dan jaringan pemasok tetap di Indonesia. Mendukung target investasi RPJMN, reformasi birokrasi, dan proyek yang didukung Danantara.

Mendorong Kemitraan Bisnis untuk Mengoptimalkan *Transfer Knowledge* dan Kapasitas Industri Domestik

HASIL YANG DIHARAPKAN

Kemitraan yang membawa pengetahuan, teknologi, dan pesanan kepada perusahaan Indonesia, dengan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang sesuai kemampuan pemasok saat ini, membantu perusahaan naik ke pekerjaan bernilai lebih tinggi sambil menjaga daya saing biaya.

Hambatan yang dihadapi



Regulasi: Metode berbeda tiap sektor dan menghitung setiap produk terpisah, sehingga ambang minimum sulit dicapai.



Kelembagaan: Kementerian sektor dan lembaga pengadaan tidak selalu berkoordinasi mengenai aturan TKDN.



Kapasitas: Sebagian input belum diproduksi lokal dengan mutu atau skala yang dibutuhkan, termasuk di migas.



Tujuan kebijakan: Aturan yang kaku dapat membatasi akses teknologi dan melemahkan insentif pelatihan serta R&D.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- **83%** bahan baku perusahaan asing di Indonesia berasal dari produsen Indonesia (2019); FDI meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan hulu (Bank Dunia).
- Batas minimum TKDN diturunkan menjadi **25%** bila tidak ada produk dalam negeri.
- Ketersediaan obat baru di Indonesia terendah di Asia-Pasifik, **9%** (laporan USABC 2025).

REFERENSI REGIONAL

Vietnam: Resolusi 68 menargetkan dukungan bagi minimal 20 perusahaan swasta besar yang mampu masuk rantai nilai global.

Malaysia: Program MIDA menjodohkan perusahaan lokal dengan pembeli multinasional; pusat talenta MIDA–MARA 2026 menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan perusahaan.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Memetakan kapabilitas per sektor (kesiapan pemasok, keterampilan tenaga kerja, kesenjangan teknologi) dan sebagai basis peta jalan industri.
- 2 Menyesuaikan persyaratan TKDN dengan ketersediaan, mutu, skala, dan pengiriman yang terbukti, dengan metode perhitungan yang jelas dan peninjauan berkala.
- 3 Mengoptimalkan kontribusi perusahaan dalam Permenperin 35/2025 guna mendorong pembiayaan bersama dan kemitraan pelatihan dan riset agar perusahaan lokal masuk rantai pasok global.
- 4 Menghubungkan pemasok Indonesia dengan multinasional dan rantai nilai regional.
- 5 Membentuk kelompok kerja bersama otoritas industri dan kementerian sektor agar aturan selaras dengan tujuan akses dan investasi.
- 6 Menyediakan jalur kepatuhan alternatif di sektor minyak dan gas bila input kritis tidak tersedia di dalam negeri.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Barang dan jasa yang dipakai masyarakat, dari elektronik dan peralatan energi hingga obat, tetap tersedia, dan lebih banyak orang memperoleh pekerjaan terampil pada *supplier* dari Indonesia.

BAGI USAHA & PEKERJA

Supplier memperoleh keterampilan teknis dan naik ke pekerjaan bernilai lebih tinggi, pekerja memperoleh pelatihan, dan UMKM menemukan peluang. Perusahaan mendapat aturan yang dapat dipenuhi dan jalur *supplier* berkualitas tinggi.

BAGI PEMERINTAH

Lebih banyak nilai dari investasi asing dapat tinggal di Indonesia, mendukung hilirisasi dan industrialisasi. Danantara dapat berperan sebagai mitra pembiayaan bersama untuk pengembangan pemasok.

Menyeimbangkan Stabilitas Cadangan dan Fleksibilitas Reinvestasi demi Pertumbuhan Produktif

HASIL YANG DIHARAPKAN

Peninjauan yang melibatkan eksportir dan bank, serta panduan yang jelas tentang cara memanfaatkan devisa hasil ekspor (DHE) yang ditahan, dapat melindungi cadangan sekaligus memungkinkan perusahaan membayar pemeliharaan, peralatan, dan ekspansi tepat waktu.

Hambatan yang dihadapi



Regulasi: Aturan waktu, penempatan, dan penggunaan membatasi kas dan telah diubah **tiga kali** sejak Maret 2025.



Kelembagaan: Penempatan terutama di bank BUMN, yang kapasitas lindung nilainya bisa berbeda dari bank global.



Kaitan energi: Perubahan retensi memengaruhi keekonomian proyek migas di bawah kontrak bagi hasil yang ada.



Tujuan kebijakan: Ketahanan cadangan adalah tujuan yang sah; tantangannya mencapainya tanpa menghambat ekspor.

DATA DAN TEMUAN PENDUKUNG

- Peraturan Pemerintah 36/2023 diubah **tiga kali**: Maret 2025, Februari 2026, Juni 2026.
- Eksportir non-migas menahan **100% selama 12 bulan** (konversi rupiah dibatasi 50%); sektor migas menahan **30% selama 3 bulan atau lebih**.
- Satu anggota menilai dampaknya **parah**, di atas USD 1 juta per tahun; yang lain melihat perbaikan kecil, tidak ada perubahan, atau memburuk.

PANDUAN INTERNASIONAL

IMF: langkah arus modal harus tertarget, transparan, dan sementara.

Kode OECD: negara peserta berkomitmen menghapus pembatasan pergerakan modal secara bertahap.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Membentuk satu mekanisme peninjauan yang akuntabel, dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan keikutsertaan eksportir dan bank sebelum ada perubahan.
- 2 Mengkaji dampak yang mungkin timbul sebelum setiap perubahan berlaku. Untuk migas, sertakan ketentuan kontrak bagi hasil yang ada, seperti cost recovery, restitusi pajak, dan penetapan harga.
- 3 Meninjau kebijakan DHE secara berkala berdasarkan indikator yang dipublikasikan.
- 4 Memberi jeda waktu yang cukup antarperubahan dan umumkan tiap perubahan dengan masa transisi yang jelas.
- 5 Menerbitkan ketentuan pelaksana tentang kelayakan, penggunaan yang diizinkan, dokumen, jangka waktu, dan eskalasi.
- 6 Mempertimbangkan untuk memperluas pengaturan yang lebih ringan bagi eksportir tambang yang memenuhi syarat (30% ditahan tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk) ke sektor lain.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Pihak yang pekerjaannya terkait aktivitas isu ini dapat mempertahankan pekerjaan dan penghasilan, pemasok lokal tetap punya pelanggan, dan rumah tangga serta industri tetap memperoleh energi dan bahan.

BAGI USAHA & PEKERJA

Eksportir dapat membayar pemeliharaan, peralatan, dan ekspansi tepat waktu, dan bank dapat membangun layanan sesuai kebutuhan eksportir. Anggota USABC memperoleh fleksibilitas treasuri dan dasar keputusan proyek jangka panjang.

BAGI PEMERINTAH

Proyek yang beroperasi terus menghasilkan pajak, PNBPN, dan bahan baku (feedstock), sehingga cadangan dapat diperkuat tanpa memutus kegiatan yang membiayai negara.

Memperkuat Implementasi Perjanjian Perdagangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

HASIL YANG DIHARAPKAN

Ketika setiap komitmen perdagangan punya penanggung jawab yang akuntabel, jadwal publik, dan saluran penyelesaian masalah, eksportir (terutama UMKM) dan investor dapat merencanakan usaha, sehingga perdagangan dan investasi bertambah.

Hambatan yang dihadapi



Kelembagaan: Tanggung jawab tersebar di banyak kementerian; tahapan dan tanggal berlaku tidak selalu dipublikasikan.



Kapasitas: Usaha kecil mungkin kekurangan informasi, staf, dan dana untuk memanfaatkan perjanjian.



Proses: Komitmen dalam undang-undang dapat sulit dimanfaatkan jika aturan kelayakan dan panduannya tidak jelas.



Tujuan kebijakan: Komitmen diseimbangkan dengan prioritas dalam negeri, sehingga pelaksanaannya berhati-hati dan bertahap.

BUKTI UTAMA

- Hampir 68% ekspor Indonesia 2025 menuju mitra perjanjian perdagangan, dan Kementerian Perdagangan menyebut pemanfaatan penuh perjanjian sebagai “agenda strategis” (Juni 2026).
- Pada September 2025, Kementerian Perdagangan menyatakan tengah menyiapkan sistem SKA (surat keterangan asal) preferensi otomatis untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian dagang.

REFERENSI REGIONAL

Vietnam: Data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan eksportir hanya memakai sekitar 35% preferensi tarif perjanjian UE dan 16% CPTPP.

Malaysia: Memperoleh tarif AS lebih rendah, 10% bukan 12,5%, atas komitmen melarang impor produk kerja paksa.

REKOMENDASI LANGKAH TINDAK LANJUT

- 1 Tunjuk otoritas koordinasi pusat dan lembaga yang akuntabel untuk setiap komitmen, dengan peta jalan dan tanggal target yang dipublikasikan.
- 2 Bentuk forum implementasi bersama industri terdampak untuk menguji kesiapan.
- 3 Publikasikan aturan kelayakan, tanggal berlaku, prosedur, kemajuan, dan alasan keterlambatan, dengan jalur eskalasi.
- 4 Selenggarakan dialog berkala dengan pemerintah mitra dan komunitas bisnis.
- 5 Tinjau hasil hukum, administratif, dan komersial, termasuk apakah UMKM mengetahui dan mampu memanfaatkan komitmen tersebut.
- 6 Danai kegiatan peningkatan kesadaran bagi UMKM dan kurangi biaya bagi pelaku usaha, serta tingkatkan upaya pemanfaatan peluang implementasi perjanjian dagang.

Manfaat bagi Indonesia

BAGI MASYARAKAT

Lebih banyak orang dapat memperoleh pekerjaan terkait ekspor dan investasi, dan konsumen dapat menikmati pilihan lebih luas serta harga lebih stabil.

BAGI USAHA & PEKERJA

Eksportir dan pemasok, terutama UMKM, dapat menjangkau pasar yang lebih besar dan rantai pasok regional. Anggota USABC dapat merencanakan perubahan yang diperkirakan dan membantu pemasok masuk ke rantai nilai global.

BAGI PEMERINTAH

Perdagangan yang tumbuh dapat menambah pendapatan ekspor dan pajak, dan Indonesia dapat membangun reputasi sebagai mitra andal. Mendukung target ekspor dan investasi RPJMN serta industrialisasi.

→ MELANGKAH KE DEPAN

Aturan andal dan pelaksanaan efektif dapat membuat investasi yang ada menjadi sumber pertumbuhan baru

DARI MANA PERTUMBUHAN BERIKUTNYA AKAN BERASAL

Pertumbuhan jangka pendek Indonesia terutama akan berasal dari perusahaan yang beroperasi di sini. Kepastian regulasi, mitra pemerintah yang menangani masalah pascaperizinan, dan kerangka DHE yang menyeimbangkan cadangan dana dengan reinvestasi membantu mereka beroperasi dan berekspansi, sekaligus menjaga lapangan kerja, hubungan dengan pemasok, dan penerimaan negara.

BAGAIMANA KEDELAPAN REKOMENDASI SALING MELENGKAPI

Perdagangan andal

REKOMENDASI 1, 2, 3

Persetujuan impor yang lebih cepat, kepercayaan yang lebih besar pada standar, dan kapabilitas pemerintah yang lebih kuat dalam tata kelola digital membantu barang, jasa, dan pengetahuan menjangkau pelaku usaha dan konsumen Indonesia. Pemerintah dapat memusatkan perhatian pada risiko yang nyata.

Kepercayaan bertahap

REKOMENDASI 4, 5, 7

Regulasi yang dapat diprediksi, mitra di pemerintah setelah perizinan, serta kerangka DHE yang seimbang membantu dunia usaha terus beroperasi dan merencanakan ekspansi.

Kapabilitas & niaga

REKOMENDASI 6, 8

Pendekatan TKDN berbasis kapabilitas dan pelaksanaan komitmen perdagangan yang praktis menunjukkan Indonesia terbuka pada hal yang meningkatkan produktivitas, dan membantu pemasok Indonesia menjadi mitra perusahaan global.

Kepercayaan terbangun seiring waktu, dari aturan yang diterapkan konsisten, komitmen yang ditepati, dan pemerintah yang bekerja bersama investor sebagai mitra jangka panjang.

TUJUAN PERTUMBUHAN: MANFAAT LEBIH LUAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Pekerja dan masyarakat

Pekerjaan stabil dengan keterampilan tinggi di wilayah industri dan sumber daya.

Konsumen dan pelaku usaha

Akses yang andal terhadap barang dan jasa terpercaya.

Pemasok dan UMKM

Pesanan dan kemitraan baru, serta peran lebih besar dalam rantai nilai.

Pemerintah

Investasi, perdagangan, penerimaan, dan reputasi yang lebih kuat sebagai mitra andal.

**Hasil ini bergantung pada kebijakan serta pelaksanaannya.*

DUKUNGAN USABC DAN ANGGOTA USABC

- 1 Pengalaman regional**
Berbagi cara pemerintah ASEAN lain menangani tantangan serupa.
- 2 Masukan teknis**
Berbagi data operasional dan rincian kasus agar aturan teruji terhadap praktik.
- 3 Saluran dialog**
Mendukung dialog tentang standar, perjanjian perdagangan, dan investasi.
- 4 Pelatihan bersama**
Bekerja sama dengan instansi, universitas, dan laboratorium untuk melatih aparatur, asesor, dan pemasok.
- 5 Pengembangan pemasok**
Menghubungkan pemasok Indonesia dengan jaringan pengadaan anggota.
- 6 Tinjauan kemajuan**
Melaporkan bagaimana perubahan berjalan dalam praktik.



Advancing U.S. Business in Southeast Asia

Indonesia

Lantai 25 - Revenue Tower SCBD
Jln. Jenderal Sudirman No. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
+62 21 5012 1123
indonesia@usasean.org

Malaysia

26th Floor, Menara Maxis
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
+60 3 2615 7975
malaysia@usasean.org

Filipina

Ascott Bonifacio Global City Manila
Room 808, 8/F Ascott BGC 5th Avenue corner
28th St. Bonifacio Global City
Taguig City 1634, Philippines
+63 2 860 9820
philippines@usasean.org

Singapura

460 Alexandra Road,
#26-06, mTower, Singapore 119963
+65 6339 8885
singapore@usasean.org

Thailand

23rd Floor, Siam Piwat Tower
989 Rama 1 Road
Patumwan, Bangkok 10330
+66 2 649 1119
thailand@usasean.org

Vietnam

Unit 1031-1033, Pacific Place, Prime Business
Center, 83B Ly Thuong Kiet St.
Hanoi
+84 90 612 7370
vietnam@usasean.org

Washington, D.C.

1101 17th Street, NW
Suite 411
Washington, DC 20036 USA
+1 202 289 1911
mail@usasean.org

New York

521 Fifth Ave (@43rd St)
Suite 1700
New York, NY 10175 USA
+1 212 687 4505
mail@usasean.org

